



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA
SUB UNIT KERJA : BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN ESDM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NOVA ADIWIDANTO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN ESDM
3. NHK : 210539

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.730.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 226 m²/72 m² di SEMARANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 1000 m² di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 7570 m² di JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
4. Tanah Seluas 2900 m² di JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 222.700.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA ASTREA STAR SEPEDA MOTOR Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 700.000
3. MOBIL, TOYOYA YARIS SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
4. MOTOR, YAMAHA LEXI MOTOR MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 16.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 36.321.438**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---



Sub Total	Rp.	2.005.021.438
III. HUTANG	Rp.	50.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.955.021.438

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **25 Juli 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.